

KABUPATEN MERANGIN 1999-2009

*Eprili Fitrika

Alumni Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Batanghari Jambi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perkembangan Kabupaten Merangin pasca pemekaran ditinjau dari segi sarana dan prasarana termasuk di dalamnya faktor-faktor serta strategi yang digunakan untuk meningkatkan pembangunan daerah. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan multidimensional. Pendekatan multidimensional adalah suatu pendekatan yang digunakan dengan cara memperhatikan berbagai aspek kehidupan sosial yang turut mempengaruhi proses pertumbuhan dan perkembangan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan secara umum bahwa pemekaran belum memberikan dampak positif yang signifikan bagi pengembangan wilayah di Kabupaten Merangin pada periode 1999-2009. Walaupun terjadi peningkatan pada berbagai indikatornya, namun kecenderungan peningkatan yang terjadi dinilai moderat, relatif sama pada periode sebelum pemekaran. Kedepannya pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya guna tercapai peningkatan kesejahteraan.

Kata Kunci: Pemekaran, Kabupaten Merangin

Abstract

This study aims to describe the development of Merangin Regency after its expansion in terms of facilities and infrastructure including the factors and strategies used to improve regional development. The research approach used is a theoretical approach by applying a multidimensional approach. The multidimensional approach is an approach that is used by paying attention to various aspects of social life that also influence the process of historical growth and development. The results showed that in general, the expansion had not had a significant positive impact on the development of the Merangin Regency area in the 1999-2009 period. Although there has been an increase in various indicators, the trend of the increase is considered moderate, relatively the same in the period before the expansion. In the future, the regional government is expected to optimize the use of resources in order to achieve increased welfare.

Keywords: expansion, Merangin Regency

A. PENDAHULUAN

Kabupaten Merangin merupakan salah satu dari sepuluh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jambi. Kabupaten Merangin berdiri berdasarkan Undang-Undang No 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 50), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kabupaten Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25). Dan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3903) (LPPD Kab. Merangin, 2009).

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah suatu proses

perbaikan yang berkesinambungan dari suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan menuju kepada kehidupan yang lebih baik, dimana proses pembangunan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraan rakyat serta harkat dan martabat manusia yang meliputi peningkatan berbagai barang kebutuhan pokok, peningkatan standar hidup serta perluasan pilihan ekonomi dan sosial bagi seluruh masyarakat (Todaro dan Smith, 2009).

Tujuan dari pembangunan ekonomi adalah mencapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi. Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah dapat ikut campur secara aktif maupun secara pasif (Suparmoko, 1996). Dalam setiap sistem perekonomian, apakah sistem perekonomian kapitalis atau sistem perekonomian sosialis, pemerintah senantiasa mempunyai peranan yang penting. Peranan pemerintah sangat besar dalam sistem perekonomian sosialis dan sangat terbatas dalam sistem perekonomian kapitalis murni seperti dalam sistem kapitalis yang dikemukakan oleh Adam Smith (Mangkoesoebroto, 2011).

Selama kurun waktu pemekaran tersebut hingga satu dasawarsa kemudian, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Merangin tidak berkembang sepesat Kabupaten Sarolangun. Padahal, jika dilihat dari segi PAD, Merangin lebih unggul dari pada Sarolangun. Merangin selama 10 tahun memiliki PAD rata-rata sebesar 49 milyar setahun, sementara Sarolangun hanya 47 milyar pertahun (BPS, 2009). Perbandingan 2 milyar tersebut seharusnya membuat Merangin lebih berkembang dari Sarolangun.

Pendapatan perkapita di Merangin lebih tinggi dibandingkan Sarolangun, Rp. 876.008 jiwa/km, sementara Sarolangun Rp. 654.902 jiwa/km. Kabupaten Merangin memiliki penduduk lebih banyak dibanding Sarolangun, yaitu 333.006 jiwa, sementara Sarolangun memiliki penduduk sebanyak 246.245 jiwa Pertumbuhan IPM per tahunnya adalah 24% untuk Merangin dan 19 % untuk Sarolangun (BPS, 2009). Hal tersebut dapat dimaklumi karena Kabupaten Merangin merupakan mayoritas daerah transmigrasi lahan baru, dimana 65% masyarakat yang berdomisili di Merangin merupakan warga transmigrasi dari pulau Jawa. (BPS,2009). Dengan dua keunggulan tersebut, tentunya asumsi mengenai Kabupaten Merangin yang seharusnya adalah lebih maju dari pada Kabupaten Sarolangun.

Perkembangan tersebut sangat lambat pada infrastruktur, dimana dana PAD yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan dan gedung tidak dialokasikan secara maksimal. Berdasarkan data BPS, hanya 35% dana PAD digunakan untuk infrastruktur.

Beberapa kebijakan pemerintah lebih memfokuskan pada lahan pertanian serta industri untuk menopang perekonomian Merangin. Seiring dengan indikasi yang disebutkan sebelumnya, dari faktor sarana dan prasarana tersebut mengenai pendidikan, Sarolangun otomatis menjadi lebih unggul karena bangunan sekolah sebelum pemekaran berpusat di Sarolangun. Sehingga Merangin semakin tertinggal karena harus mendirikan beberapa sekolah baru. Jika dibandingkan melalui aspek

pertumbuhan ekonomi, Merangin jauh lebih unggul karena merupakan daerah baru dimana pengelolaan sumber daya masih luas dan membuka banyak kesempatan. Pertumbuhan ekonomi di Merangin mencapai angka 4,5% per tahun, sementara Sarolangun hanya 2,8%/tahun.

Menurut Kuznets, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro, 2008).

Dalam kaitannya dengan pendapatan daerah, Peacock dan Wiseman (1961) dalam teorinya mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang terbaik berkesimpulan bahwa perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat (Mangkoesebroto, 2011). Oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Dengan adanya data data di atas jelas terlihat bahwa sebenarnya Merangin memiliki kesempatan untuk membangun infrastrukturnya lebih baik dari Sarolangun, namun hal tersebut

tidak sesuai dengan kenyataannya dimana Merangin tertinggal oleh Sarolangun pada aspek infrastruktur. Oleh Karena itu penulis ingin meneliti dan memaparkan tentang “*Kabupaten Merangin 1999-2009*” yang difokuskan pada perkembangan infrastrukturnya.

B. METODE

Metode Penelitian sejarah yang pada dasarnya adalah penelitian terhadap sumber-sumber sejarah, merupakan implementasi dari tahapan kegiatan yang tercakup dalam metode sejarah, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi.

Tahapan kegiatan yang disebut terakhir sebenarnya bukan kegiatan penelitian, melainkan kegiatan penulisan sejarah (penulisan hasil penelitian). Sumber-sumber sejarah merupakan bahan-bahan mentah (*raw materials*) sejarah yang mencakup segala macam evidensi atau bukti-bukti yang telah ditinggalkan oleh manusia yang menunjukkan segala aktivitas mereka di masa lalu baik berupa tulisan, keterangan lisan maupun berupa produk dari kegiatan-kegiatan manusia yang memuat informasi tentang kehidupan manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja ditinggalkan untuk memberikan informasi kepada generasi berikutnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kondisi Sosial Ekonomi

Kabupaten Merangin didirikan berdasarkan UU No. 54/1999 mengenai Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Bungo, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebelumnya, kabupaten-kabupaten tersebut diluar Tanjung Jabung Timur

merupakan bagian dari Kabupaten Sarolangun Bangko dengan menggunakan nama lama yaitu Merangin ketika kabupaten masih bergabung dengan Kabupaten Bungo Tebo pada tahun 1956.

Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Merangin, maka kabupaten ini memiliki daerah seluas 820,1 km² dan di diami oleh 8.775 penduduk di 2.288 rumah tangga. Nilai pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan baru-baru ini di kabupaten Merangin jika dibandingkan dengan Provinsi Jambi dan rata-rata nilai nasional di Indonesia, berdasarkan data BPS, maka akan seperti di bawah ini. Pertumbuhan keseluruhan di Merangin sudah kuat dan telah melampaui rata-rata nasional. Tingkat kemiskinan berkurang dari sekitar 15% populasi di tahun 2005 hingga 8% di tahun 2011, sementara populasi tumbuh sekitar 63.000 jiwa. Daerah ini terpencil, dengan beberapa jalan dan wilayah pegunungan yang terjal. Daerah ini memiliki banyak budidaya pertanian dan tutupan hutan. Delapan puluh persen daerah Merangin terletak di ketinggian lebih dari 1.000 meter (m).

Kabupaten ini beriklim tropis dan udara sejuk dengan suhu udara rata-rata berkisar 22°C. Kecamatan Sungai Tenang memiliki daerah seluas 820.1 km² dan terletak 206 km dari Bangko, ibu kota kabupaten. Jarak tempuh berkendaraan dari Bangko ke Rantau Suli sekitar 8 jam di jalanan beraspal dan tanah. Denyut perekonomian utama di desa Rantau Suli dan daerah sekitarnya berhubungan dengan pertanian dan kehutanan. Hasil panen utama adalah kayu manis, kopi dan nilam. Kayu

manis terkadang dipanen di desa untuk membantu penduduk menutupi pengeluaran khusus, seperti biaya pernikahan atau sekolah. Kopi dan nilam merupakan tanaman utama yang bernilai ekonomi tinggi (key cash crops). Banyak penduduk desa yang menanam tanaman lainnya seperti padi, kentang, cabai, pisang, dan sayuran lainnya untuk konsumsi mereka sendiri. Dengan hutannya yang luas, mencakup 46,25 persendari total daerah, ekosistem hutan Merangin memiliki pengaruh sosio ekonomi dan lingkungan hidup yang signifikan terhadap kabupaten. Sebagai contoh, banyak orang yang menggunakan rotan untuk pembuatan kerajinan tangan dan perlengkapan rumah tangga, dan kayu cendana digunakan untuk membuat kosmetik dan obat-obatan.

Selain menjadi sumber perikehidupan bagi masyarakat sekitar, hutan juga memberikan layanan lingkungan hidup sebagai fungsi hidrologis, pencegah banjir, pengendali erosi, pencegah gangguan air laut dan memelihara kesuburan tanah. Pentingnya layanan tersebut dapat dilihat dalam dampak deforestasi (penghilangan hutan): sebagai contoh, konversi dan perambahan hutan di hulu dan wilayah tangkapan air Tapir Barat untuk perkebunan kelapa sawit telah mengarah pada penurunan aliran air sungai ke pembangkit listrik mikro hidro.

Sebagian besar deforestasi di Merangin terjadi antara tahun 2006 hingga 2011 di sepanjang jalan arteri dan jalan kolektor di seluruh TN Kerinci Seblat. Sebagai tambahan, menurut Otorita TN Kerinci Seblat, tuntutan yang tinggi untuk tanah

pertanian dan perkebunan, aksesibilitas yang mudah ke daerah, tingkat perekonomian yang rendah, tingkat pendidikan yang rendah di antara angkatan kerja, dan kurangnya ketenaga kerjaan non-pertanian di luar sektor perkebunan merupakan faktor-faktor utama yang menggerakkan perambahan hutan.

Perambahan hutan memiliki dampak pada sektor-sektor lain. Sebagai contoh, tingkat aliran air sungai yang masuk ke fasilitas pembangkit mikro hidro sering tidak stabil, dan tingkat aliran air yang lebih rendah menghasilkan tenaga yang lebih kecil. Terdapat juga beberapa aktivitas kehutanan ilegal, termasuk penebangan pohon, perdagangan kayu balok, dan pertambangan. Pencurian produk hutan bukan berupa kayu dan perburuan satwa juga merupakan isu di Merangin. (BPS Merangin, 2009).

2. Strategi Pembangunan Kabupaten Merangin

Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan jika kesejahteraan masyarakat merupakan sasaran utama pembangunan daerah maka tekanan utama pembangunan akan lebih banyak diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bentuk pengembangan pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, dan peningkatan penerapan teknologi tepat guna.

Selain hal tersebut, perhatian juga hendaknya lebih lebih diarahkan pada pengembangan infrasturuktur pada sebuah daerah dalam menjamin kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur merupakan bagian penting dalam masyarakat dikarenakan sifatnya

sebagai wadah ataupun tolak ukur dalam menilai sebuah perkembangan dan kemandirian sebuah daerah. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap daerah berkembang di setiap belahan dunia diawali oleh interaksi masyarakat yang ditopang oleh ketersediaan infrastruktur.

Sebagai contoh bahwa kota Jambi pada masa lampau berkembang dengan pesat karena adanya infrastruktur perdagangan dan transportasi yang memadai sebagai daerah yang mandiri. Dengan mengesampingkan Kota Jambi kita dapat sedikit mengambil kesimpulan awal bahwa infrastruktur merupakan syarat mutlak perkembangan sebuah daerah sehingga mampu memudahkan pertukaran informasi, kebudayaan, pendidikan, ekonomi dan teknologi sehingga mampu membawa masyarakat ke jalan kesejahteraan. Otonomi daerah dengan program pemekaran wilayah sebagai dasar hukum kemandirian sebuah daerah yang berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya maka dipandang sangat perlu untuk meningkatkan infrastruktur yang mampu menunjang hal tersebut.

Tabel

Sebaran Infrastruktur Pokok dalam Setiap Lingkungan sebelum Pemekaran

No	Infrastruktur Pokok	Ketersediaan Infrastruktur Lingkungan
1	Jalan Raya Beraspal	Ada (sebagian besar rusak)
2	Air Bersih/bungker	12 (baik)
3	Jaringan Listrik	Ada (sebagian wilayah tidak ada)
4	Pasar Rakyat	Ada (sebagian

		wilayah sepi)
--	--	---------------

Sumber : BPS 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat gambaran sederhana tentang sebaran infrastruktur pokok yang ada di Kabupaten Merangin setelah pemekaran. Dalam tabel diatas aspek ketersediaan sarana air bersih juga menjadi fokus pengamatan yang menarik untuk disimak mengingat perbandingan jumlah sarana tersebut menunjukkan angka yang tidak berimbang berdasarkan kuantitas ketersediaan namun untuk melihat hal tersebut terlebih dahulu kita harus melihat rasio perbandingan masyarakat pada masing-masing lingkungan.

Tabel
Rasio Perbandingan Masyarakat dengan Jumlah Air Bersih

Wilayah	Jumlah Penduduk	Jumlah Sarana Air Bersih	Rasio Perbandingan
Kota Bangko	133.206 (jiwa)	12	1/361

Sumber : BPS 2010

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah bunker sebagai sarana pengadaan air bersih dengan jumlah masyarakat yang dilayani. Hal senada juga di ungkapkan oleh Bapak Ismet selaku warga Kota Bangko untuk listrik *“Dari dulu tidak ada listrik disini. Dulu orang-orang pakai Accu sekarang ada juga yang pakai genset”* (wawancara tanggal 14 Agustus 2015).

Dari tabel dan uraiannya diatas dapat dilihat bahwa terdapat kesenjangan dalam ketersediaan infrastruktur pada Kabupaten Merangin sebelum pemekaran dimana beberapa wilayah tidak mempunyai

infrastruktur yang cukup memadai. Hal ini diakibatkan statusnya sebagai daerah pinggiran serta kurangnya jumlah masyarakat yang ada diwilayah tersebut.

3. Pengaruh Pemekaran Terhadap Infrastruktur Transportasi (Jalan raya)

Sesuai dengan tabel 19 tentang perbandingan infrastruktur Kota Bangko sebelum dan setelah pemekaran, dapat dilihat sebagai gambaran awal tentang infrastruktur yang tidak mengalami perubahan berarti selama 15 tahun usia pemekarannya. Hal ini di kemukakan oleh Bapak Ismail selaku warga Kota Bangko dalam petikan wawancara berikut:

“Hampir 15 tahun mekar tapi jalan disini begitu-begitu saja. Ketika jalan diwilayah lain sudah bagus jalannya, wilayah kami masih dengan kondisi yang memprihatinkan. Barulah sekarang, jalan menuju ke wilayah kami membaik”. (wawancara tanggal 23 Agustus 2015)

Dari petikan wawancara diatas dapat dilihat bahwa permasalahan selama 15 tahun tanpa memiliki jalan yang baik dikarenakan tidak adanya anggaran yang memadai oleh pemerintah kabupaten dalam hal pengadaan infrastruktur tersebut. Lebih lanjut lagi bahwa pada kenyataannya wilayah sekitar merupakan jalur provinsi sehingga ketersediaan jalan di desa lainnya yang juga merupakan pecahan dari Kota Bangko merupakan hasil pengadaan oleh pemerintah provinsi.

Ketika membahas pemekaran sebagai potensi dalam mengembangkan

daerah merupakan tugas penting dari pemerintahan mandiri untuk menjamin bahwa kebutuhan rakyat disebuah daerah tersampaikan. Dalam hal pengadaan jalan raya dikawasan pedesaan tentu sabagai desa mandiri maka sudah selayaknya menjadi tanggung jawab pemerintah desa untuk menyuarakannya kepada pemerintah kabupaten melalui mekanisme yang tertuang dalam pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2005 yang berbunyi

- a. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah kabupaten/Kota.
- b. Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipatif oleh pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya.
- c. Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa Melalui mekanisme perencanaan tersebut dapat memanfaatkan dana desa yang mulai dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi melalui program samisake (satu milyar satu kecamatan).

4. Pengaruh Pemekaran Pengadaan infrastruktur jaringan listrik

Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan premier bagi masyarakat baik dikota maupun didesa. Jika kita berkaca pada masyarakat pedesaan pada 15-20 tahun lalu, listrik merupakan barang mewah yang hanya dimiliki oleh

kalangan tertentu saja. Demikian pula dengan masyarakat desa sebagai masyarakat yang telah meleak terhadap laju perkembangan zaman sudah barang tentu menjadikan hal-hal kelistrikan sebagai hal premier dan harus mereka dapatkan terlebih lagi melihat kemajuan zaman yang menuntut masyarakat beradaptasi dari model-model pengelolaan rumah tangga secara tradisional menjadi pengelolaan rumah tangga dengan bantuan teknologi yang memerlukan arus listrik.

Dalam kasus ini, Kepala Desa Jangkat angkat bicara seperti yang dipaparkan dalam petikan wawancara berikut:

“terus terang kami merasa dianakdirikan oleh pemerintah kabupaten. Sudah belasan tahun mekar namun tidak ada jaringan listrik yang masuk. Masyarakat mengeluh dan kami selalu meminta namun sampai saat ini tidak pernah ada realisasi. Seharusnya jaringan listrik sudah masuk kesini sejak lama karena dari segi jarak, desa kami sebenarnya tidak begitu jauh dari ibu kota kecamatan” (wawancara tanggal 23 Agustus 2015).

Hal menarik untuk disimak dari hasil wawancara diatas adalah ketika kita mencermati pernyataan Kepala Desa Jangkat tentang situasi geografis desa tidak terdapat jaringan listrik yang masuk ke daerah tersebut. Patut kemudian dipertanyakan apa kemudian hal-hal dari pemekaran yang berpengaruh pada perkembangan infrastruktur pedesaan jika hal yang sifatnya premier saja tidak bisa di upayakan.

“Pemasangan jaringan listrik tidak bisa serta merta kita laksanakan. Terlalu banyak kendala yang kita temui ketika harus memasang jaringan listrik di tempat terpencil. Kondisi geografis yang berbukit membuat pemasangan jaringan listrik membutuhkan biaya yang besar” (Wawancara tanggal 5 Oktober 2015).

D. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini yakni Pemekaran berdampak signifikan bagi ketersediaan sarana dan prasarana masyarakat. Infrastruktur jalan raya yang berubah (meski lambat namun perlahan mulai diperbaiki dan menjadi semakin baik). Adanya jaringan listrik yang masuk ke desa sejak sebelum pemekaran (meski belum semua desa dapat menikmati jaringan listrik). Pasar rakyat yang semakin ramai sebagai imbas dari bagusnya akses jalan raya ke tempat tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tidak tersedianya sarana dan prasarana masyarakat dengan kata lain pemekaran tidak berdampak bagi perkembangan infrastruktur antara lain adalah Letak geografis yang kurang strategis dan potensial, Kurangnya inisiatif pemerintah desa dalam mengelola urusan rumah tangganya.

E. DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin, 2005.
Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Merangin, 2010.
Davey. 2008. *Pembiayaan Pemerintah Daerah, Praktek-Praktek Internasional dan Relevansinya*

Bagi Dunia Ketiga. Jakarta: Universitas Indonesia.
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Kabupaten Merangin, 2009.
Rahardjo, Adisasmita. 2006. *Pembangunan Perdesaaan Dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu: Yogyakarta
_____. 2005. *Pembangunan Kelautan Dan Kewilayahan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Sri, Valentina dan Aji Suryo, 2006, *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat
Kontoro, Mangkusubroto. 2011. *Analisis Keputusan*. Bandung: Genesa Exact.
Musgrave, Richard A dan Musgrave, Peggy B. 2009. *Public Finance in Theory and Practise*. Mc. Graw Hill Book Company.
Suparmoko. 2009. *Ekonomi Publik: Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Andi.
Todaro, Michael P. 2008. *Pembangunan Ekonomi Di DuniaKetiga*. Jakarta : Erlangga.